

Model Dinamis-Dua Jalur terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa di Yogyakarta

Muhammad Wahyu Kuncoro dan Anwar

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

wahyu_umby@yahoo.co.id

Abstrak. Partisipasi politik selain sebagai hak setiap warga negara juga sebagai sebuah tanggung jawab yang harus diterima demi berlangsungnya kehidupan bernegara. Mahasiswa sebagai komponen penting bagi bangsa ini sangat diharapkan partisipasinya dalam proses kehidupan politik. Angka golput pada kelompok mahasiswa sangat tinggi, namun di satu sisi, partisipasi dalam aktivitas unjuk rasa terhadap berbagai kebijakan politik adalah tinggi. Kedua hal tersebut adalah bagian dari bentuk partisipasi politik. Pada penelitian ini berfokus pada tingkat partisipasi politik mahasiswa, khususnya aktivitas mengikuti unjuk rasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peranan kemarahan berbasis kelompok (*group based anger*) dan keyakinan kemampuan kelompok (*group efficacy*) terhadap partisipasi politik pada mahasiswa. Luaran utama dari penelitian ini adalah sebuah model yang mengasosiasikan variabel-variabel kemarahan berbasis kelompok, keyakinan kemampuan kelompok, ketidakadilan prosedural, dukungan pendapat sosial, dukungan aksi sosial dan partisipasi politik mahasiswa.. Hipotesis penelitian ini adalah model dinamis dua-jalur pada tingkat partisipasi politik mahasiswa mendapat dukungan data empirik dari lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Jumlah subjek penelitian sebanyak 201 mahasiswa mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini : skala kemarahan berbasis kelompok, skala keyakinan kemampuan kelompok, skala ketidakadilan prosedural, skala dukungan pendapat sosial, skala dukungan aksi sosial dan skala partisipasi politik mahasiswa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis model persamaan struktural (*Structural Equation Model - SEM*). Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis terbukti, dengan parameter model : $\chi^2 = 4.048$ ($p > 0,05$); GFI =0,993; RMSEA = 0,008.

Kata kunci : partisipasi politik, kemarahan berbasis kelompok, keyakinan kemampuan kelompok, ketidakadilan prosedural, dukungan opini, dukungan instrumental.

Pendahuluan

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Angka "golput" pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 dari kalangan mahasiswa di Yogyakarta, khususnya yang berasal dari luar DIY, diperkirakan sangat tinggi. Dari sekitar 200.000 mahasiswa di DIY dari luar daerah, KPU DIY hanya mencatat 3.849 mahasiswa yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY. Menurut Klandermans (dalam, Zomeran et al., 2012) tindakan melakukan petisi, demonstrasi, boikot, aksi duduk, dan kerusuhan adalah contoh umum dari tindakan kolektif (*collective action*).

Banyak dari fakta sejarah bahwa mahasiswa memiliki partisipasi aktif dalam aktivitas unjuk rasa sebagai upaya untuk menyikapi dan sekaligus memberikan sosis terhadap berbagai problem sosial dan kebijakan politik pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat kecil (Matulesky, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tingkat partisipasi politik mahasiswa khusus pada partisipasi dalam aktivitas unjuk rasa. Pada penelitian ini akan difokuskan pada tingkat partisipasi politik mahasiswa yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik mahasiswa tersebut adalah dengan model tindakan kolektif dari Zomeran et al (2012), yaitu *the dinamic dual pathway model*. Zomeran et al (2012) mengungkapkan bahwa kecenderungan terlibat dalam aksi sosial dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu emosi marah (*group based anger*) dan keyakinan kemampuan kelompok (*group efficacy*), yang dirumuskan dalam sebuah model yang disebut dengan model dinamis dua-jalur (*the dinamic dual pathway model*).

Model ini menjelaskan bahwa variabel kemarahan berbasis kelompok sebagai kunci untuk memprediksi tindakan yang berorientasi pada emosi (*emotion-focused coping*). Ketika seorang individu dari sebuah kelompok lebih menghayati rasa kemarahan, maka akan cenderung menunjukkan respon atau tanggapan yang berorientasi pada emosi. Sedangkan variabel keyakinan akan kemampuan kelompok sebagai kunci untuk menjelaskan tindakan yang berfokus pada masalah (*problem-focused coping*). Individu yang lebih memperhatikan pada kemampuan kelompok maka akan cenderung memilih tindakan atau upaya mengatasi masalah yang berorientasi pada penyelesaian sumber masalah. Model ini menjelaskan bahwa kemarahan berbasis kelompok dan keyakinan akan kemampuan kelompok, masing-masing memiliki efek komplementer pada tindakan kolektif karena mereka tidak saling eksklusif.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah: Apakah model yang diajukan (*the dynamic dual pathway*) dapat menjelaskan tingkat partisipasi politik pada mahasiswa? Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada kesesuaian antara model teoritis dengan data faktual yang mengasosiasikan variabel-variabel kemarahan berbasis kelompok, keyakinan kemampuan kelompok, ketidakadilan prosedural, dukungan pendapat sosial, dukungan aksi sosial dan partisipasi politik mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan kemarahan berbasis kelompok (*group based anger*) dan keyakinan kemampuan kelompok (*group efficacy*) terhadap partisipasi politik pada mahasiswa.

Tinjauan pustaka

Partisipasi Politik

Definisi partisipasi politik menurut Calise & Lowi (2010) " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Huntington dan Nelson (1990) mengatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Menurut Huntington dan Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: a) kegiatan pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum; b) lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu; c) kegiatan organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah; d) *contacting* – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan e) tindakan kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal.

Kemarahan Berbasis Kelompok (*Group Based Anger*)

Menurut Lazarus (1991) kemarahan berbasis kelompok adalah sebuah penilaian untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompoknya. Selain mengidentifikasi pihak yang dipersalahkan, penilaian ini juga melibatkan apakah tindakan pihak tersebut adalah tidak adil, tidak sah secara hukum (*illegitimate*), tindakan tidak bermoral, atau tindakan yang tidak dapat diterima.

Averill (1982) menyatakan bahwa menyalahkan pihak luar atas ketidakadilan yang dirasakan adalah sebagai hal penting dalam pengungkapan kemarahan berbasis kelompok (*group based anger*). Demikian juga Lazarus (1991) mengatakan bahwa kemarahan adalah sebuah respon terhadap sebuah tindakan yang dinilai telah menyakiti individu

karena terkait dengan rasa harga dirinya.

Menurut Lazarus (1991) kemarahan berbasis kelompok diindikasikan adanya penghayatan emosi negatif yang diarahkan terhadap orang lain atau pihak yang disalahkan karena telah menyinggung nilai-nilai yang menjadi keyakinannya. Kemarahan berbasis kelompok ini dapat diungkap berdasarkan pengukuran seberapa kuat individu merasakan pengalaman negatif atas ketidakadilan yang meliputi : a) kekusaran; b) rasa marah dan c) frustrasi.

Ketidakadilan Prosedural (*unfairness procedural*)

Tyler (1989,1994) telah mengkonsepsikan keadilan prosedural adalah hubungan antara pembuat keputusan dan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang akan menilai keadilan prosedural atas interaksinya dengan orang lain dalam dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan dan penghargaan.

Folger & Greenberg (dalam Moorman, 1991) menjelaskan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan pada prosedur dan implementasi aturan pembagian. Sedangkan Bartol, dkk (2001) mengatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya. Leventhal mengajukan 6 (enam) aturan prosedural yang mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu, yaitu : konsistensi, minimalisasi biasa, akurasi, dapat dikoreksi, representatif dan etis (Tylor, dkk ,1995)

Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang maksud dengan ketidakadilan prosedural adalah penilaian adanya pelanggaran keadilan pada proses pembuatan dan implementasi dari suatu kebijakan yang bertujuan untuk menentukan suatu sistem distribusi tertentu berdasarkan dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan dan penghargaan diantara individu yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.

Dukungan Pendapat/Opini Sosial (*Social opinion support*).

Menurut Zomeren et al (2012) dukungan pendapat sosial adalah penilaian individu terhadap anggota kelompok lainnya bahwa mereka memiliki anggapan yang sama bahwa adanya rasa ketidakadilan yang menimpa kelompoknya. Semakin tinggi penilaian dukungan pendapat sosial akan cenderung meningkatkan kemarahan berbasis kelompok karena secara sosial akan mensyahkan bahwa ketidakadilan yang dialami kelompok benar-benar telah terjadi. Sehingga akan memunculkan rasa-bersama dalam kelompok atas ketidakadilan tersebut.

Dukungan pendapat sosial diungkap dengan skala yang mengukur seberapa besar persepsi individu bahwa semakin banyak individu lain dalam kelompok memiliki penilaian yang sama terhadap ketidakadilan yang menimpa kelompoknya. Semakin banyak anggota lain yang berbagi atau mengungkapkan bahwa mereka juga merasakan ketidakadilan, maka akan semakin tinggi dukungan pendapat sosial. Menurut Zomeren et al (2012) dukungan pendapat sosial tidak berperan langsung dengan tindakan sosial (*social action*), namun variabel ini memberi pengaruh terhadap rasa kemarahan bersama di dalam kelompok (*group based anger*).

Keyakinan Kemampuan Kelompok (*Group Efficacy*)

Meskipun terdapat lingkungan yang mendorong individu untuk terlibat dalam suatu tindakan perubahan (*collective action*) agar memperoleh peningkatan kesejahteraan individu, namun sebenarnya hal ini sangat terbatas apabila hanya bersifat individual saja. Sesuatu hal yang sangat logis apabila tindakan individu tidak memberikan keuntungan bagi kelompok apabila anggota yang lain tidak melakukan hal yang sama (Olson's 1968).

Terkait hal tersebut maka muncul konsep *group efficacy beliefs* yang bermakna adanya kepercayaan permasalahan kelompok dapat diselesaikan dengan usaha bersama (Bandura, 1997). Pengertian ini menjelaskan sebuah perubahan dari berfokus pada sumber-sumber kekuatan individu menuju fokus pada harapan subjektif bahwa masing-masing merasa memiliki kekuatan atau kemampuan kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui aksi sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan kelompok mampu menjadi prediktor yang baik untuk tindakan kelompok (*Collective action*). Menurut Zomeren, et.al. (2008) *group efficacy* dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang berfokus pada problem (*problem-focus approach coping*) pada ketidakberuntungan kolektif dan sebagai pelengkap penyelesaian masalah berfokus pada emosi sebagai representasi dari (*group based anger*).

Menurut Gibson (2000), terdapat 3 komponen utama untuk mengungkap *group efficacy beliefs*, yang meliputi kepercayaan :

- a. Kemampuan kelompok berdasarkan urgensi waktu, yaitu kepercayaan bahwa kelompok mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang tersedia.

- b. Kesepakatan internal kelompok, yaitu besarnya harapan bahwa akan banyak anggota kelompok yang akan menyetujui keputusan final yang akan diambil kelompok dalam penyelesaian tugasnya.
- c. Efektivitas keputusan, yaitu besarnya harapan kelompok bahwa keputusan yang diambil adalah efektif untuk menyelesaikan tugas atau problem yang sedang dihadapi.

Dukungan Instrumental Sosial (social instrumental support)

Potensi penyelesaian masalah terkait dengan penilaian individu terhadap sumber-sumber yang dapat digunakan. Sebagaimana tindakan yang berbasis kelompok. Aksi sosial menghendaki individu untuk fokus pada sumber-sumber berbasis kelompok. Fokus penting dalam sumber-sumber kelompok adalah penilaian dukungan instrumen sosial. Dukungan instrumental sosial menyediakan sumber-sumber dari orang lain yang berkeinginan melakukan tindakan nyata untuk merubah ketidakberuntungan kelompok (Klandermans, 1997).

Dukungan instrumental membantu peningkatan sumber-sumber material pada kepercayaan terhadap kemampuan kelompok (*group efficacy*). Keinginan anggota lain untuk terlibat dalam aksi sosial memberi kesan akan semakin kuatnya pergerakan kekuatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pada kemampuan kelompok. Seorang individu yang mempersepsi bahwa mereka memiliki dukungan instrumental sosial yang semakin besar, maka mereka akan memiliki perasaan yang semakin kuat bahwa kelompok memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dalam rangka mengubah keadaan yang lebih menguntungkan (Zomeran, et al, 2012).

G. The Dynamic Dual Pathway Model .

Menurut Tyler (1994), tingkat partisipasi warga negara terhadap berbagai program yang diselenggarakan lembaga-lembaga resmi pemerintah sangat terkait dengan pengaruh pengalaman atau penilaian keadilan yang dirasakan terkait dengan lembaga-lembaga tersebut. Keadilan sosial adalah suatu norma mendasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang akan sangat terpengaruh oleh tindakan yang mereka persepsi sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil. Keadilan sosial sebagai persoalan penting untuk memahami perilaku sosial, sehingga para psikolog sosial melakukan studi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seseorang mempersepsi keadilan dan bagaimana pengaruh persepsi tersebut terhadap reaksi seseorang (Lind & Tyler, dalam Van den Bos, dkk , 2004).

Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan tingkat partisipasi politik mahasiswa tersebut adalah dengan model tindakan kolektif dari Zomeran et al (2012), yaitu *the dinamic dual pathway model*. Zomeran et al (2012) mengungkapkan bahwa kecenderungan terlibat dalam aksi sosial dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu emosi marah (*group based anger*) dan keyakinan kemampuan kelompok (*group efficacy*), yang dirumuskan dalam sebuah model yang disebut dengan **model dinamis dua-jalur** (*the dinamic dual pathway model*).

Model ini menjelaskan bahwa variabel kemarahan berbasis kelompok sebagai kunci untuk memprediksi tindakan yang berorientasi pada emosi (*emotion-focused coping*). Ketika seorang individu dari sebuah kelompok lebih menghayati rasa kemarahan, maka akan cenderung menunjukkan respon atau tanggapan yang berorientasi pada emosi. Sedangkan variabel keyakinan akan kemampuan kelompok sebagai kunci untuk menjelaskan tindakan yang berfokus pada masalah (*problem-focused coping*). Individu yang lebih memperhatikan pada kemampuan kelompok maka akan cenderung memilih tindakan atau upaya mengatasi masalah yang berorientasi pada penyelesaian sumber masalah. Model ini menjelaskan bahwa kemarahan berbasis kelompok dan keyakinan akan kemampuan kelompok, masing-masing memiliki efek komplementer pada tindakan kolektif karena mereka tidak saling eksklusif .

Berdasarkan *the dinamic dual pathway model* yang diungkapkan oleh Zomeran et al (2012) tersebut, maka dalam menjelaskan partisipasi politik akan melibatkan beberapa konsep yaitu partisipasi politik, kemarahan berbasis kelompok (*group based anger*), keyakinan kemampuan kelompok (*group efficacy*), ketidakadilan prosedural (*procedural unfairness*), dukungan pendapat sosial (*social opinion support*), dukungan aksi sosial (*social action support*). Ketidakadilan prosedural, dukungan pendapat sosial, dukungan aksi/instrumental sosial tersebut sebagai variabel independen. Sedangkan partisipasi politik, kemarahan berbasis kelompok keyakinan kemampuan kelompok, secara bersama-sama menjadi variabel dependen.

Metode Penelitian

Partisipasi politik diungkap menggunakan pertanyaan yang mengungkap partisipasi mereka dalam kegiatan unjuk rasa dan menggalang masa.

Kemarahan berbasis kelompok ini dapat diungkap berdasarkan pengukuran seberapa kuat individu

merasakan pengalaman negatif atas ketidakadilan yang meliputi : a) kekusaran, b) rasa marah dan c) frustrasi (Lazarus, 1991).

Ketidakadilan prosedural diungkap menggunakan aspek-aspek keadilan prosedural dari Leventhal mengajukan 6 (enam) aturan prosedural yang mempengaruhi penilaian keadilan oleh individu, yaitu : konsistensi, minimalisasi biasa, akurasi, dapat dikoreksi, representatif dan etis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang mengungkap seberapa besar pelanggaran aturan-aturan keadilan prosedural yang dirasakan.

Dukungan pendapat sosial diungkap dengan skala yang mengukur seberapa besar persepsi individu bahwa semakin banyak individu lain dalam kelompok memiliki penilaian yang sama terhadap ketidakadilan yang menimpa kelompoknya. Semakin banyak anggota lain yang berbagi atau mengungkapkan bahwa mereka juga merasakan ketidakadilan, maka akan semakin tinggi dukungan pendapat sosial.

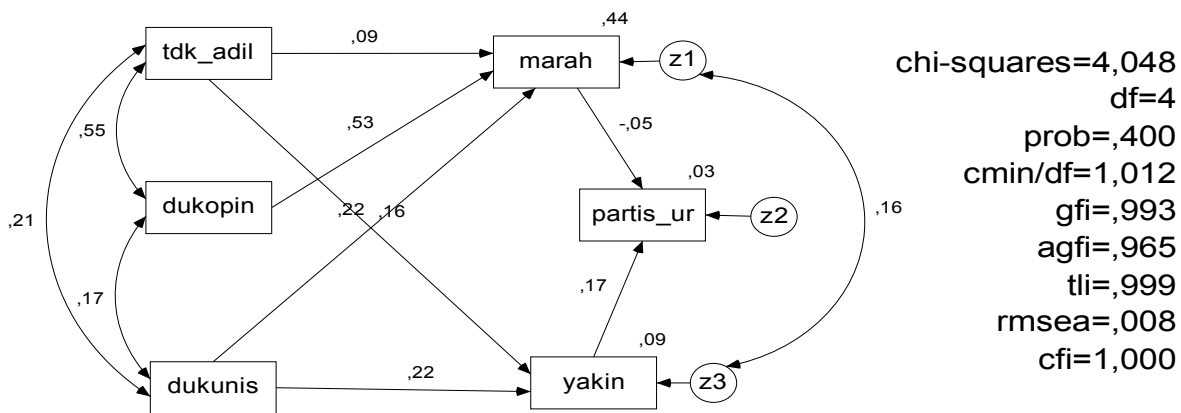
Group efficacy diungkap menggunakan skala berdasarkan konsep yang diajukan oleh Gibson (2000) yang meliputi kepercayaan a) kemampuan kelompok berdasarkan urgensi waktu, b) kesepakatan internal kelompok, dan c) efektivitas keputusan.

Dukungan instrumental sosial ini diungkap menggunakan skala yang mengungkap seberapa kuat persepsi individu bahwa mereka memiliki dukungan materi atau aksi sosial yang semakin besar, sehingga merasa kelompok memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dalam rangka mengubah keadaan yang lebih menguntungkan (Zomeren, et al, 2012).

Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang berdomisili di Yogyakarta. Berjumlah 201 mahasiswa. Lokasi penelitian adalah di Yogyakarta.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil uji model *The dynamic dual pathway model* seperti yang telah diusulkan sebelumnya untuk mendapatkan nilai chi square (χ^2) minimum dan nilai p yang maksimum dengan harapan diperoleh model yang fit (tidak berbeda dengan data dilapangan). Akhirnya diperoleh model sebagaimana tertera pada gambar I berikut.:



Gambar I. Model dinamis dua-jalur

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Amos 16.0.0, diperoleh: $\chi^2 = 4.048$ ($p > 0,05$); GFI = 0,993; RMSEA = 0,008. Parameter tersebut menunjukkan bahwa model tersebut fit.

Berdasarkan model diperoleh menjelaskan bahwa variable kemarahan berbasis kelompok tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap partisipasi unjuk rasa. Variabel ketidakadilan prosedural memiliki peranan yang kecil terhadap kemarahan berbasis kelompok, namun memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keyakinan kemampuan keyakinan kelompok. Mahasiswa yang mempersepsikan bahwa apabila didalam kelompoknya

mendapatkan perlakuan ketidakadilan prosedural akan mendorong meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan kelompok.

Terkait dengan dukungan opini, bahwa variabel ini memiliki dukungan yang signifikan terhadap variabel kemarahan berbasis kelompok. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zomeran et al (2012), bahwa dukungan pendapat/opini sosial adalah penilaian individu terhadap anggota kelompok lainnya bahwa mereka memiliki anggapan yang sama bahwa adanya rasa ketidakadilan yang menimpa kelompoknya. Seorang mahasiswa yang menilai bahwa semakin banyak anggota kelompok/masyarakatnya yang mengeluhkan tentang dilanggarnya rasa keadilan, maka akan meningkatkan rasa kemarahan berbasis kelompok.

Dukungan instrumental sosial adalah persepsi seseorang bahwa adanya sumber-sumber dari orang lain yang membantu kemudahan untuk melakukan tindakan nyata dalam upaya merubah ketidakberuntungan kelompok (Klandermans, 1997). Mahasiswa yang mempersepsi adanya sumber-sumber di dalam kelompoknya yang membantu kemudahan untuk melakukan tindakan nyata, maka akan berimbas pada rasa kemarahan berbasis kelompok menjadi cenderung semakin tinggi. Peranan dukungan instrumental terhadap keyakinan kemampuan kelompok juga menunjukkan arah yang positif, sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Apabila dirasakan adanya dukungan instrumental maka akan meningkatkan keyakinan kemampuan kelompok.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi politik mahasiswa lebih ditentukan pada peranan keyakinan kemampuan kelompok dari pada kemarahan berbasis kelompok. Model ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian masalah berdasarkan fokus problem (*problem focus coping*) mampu mendorong munculnya partisipasi politik dibandingkan dengan koping berdasarkan emosi.

Hal-hal menarik lainnya adalah, variabel-variabel prediktor yaitu ketidakadilan prosedural, dukungan opini, dan dukungan instrumental menunjukkan pengaruhnya dengan cara berbeda dibandingkan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Pada awalnya ketidakadilan prosedural adalah prediktor untuk kemarahan berbasis kelompok, namun pada model ini justru menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan. Variabel ketidakadilan prosedural justru berpengaruh signifikan terhadap keyakinan kemampuan kelompok.

Pada variabel dukungan opini secara konsisten mendukung terhadap kemarahan berbasis kelompok. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh variabel dukungan instrumental yang secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemarahan berbasis kelompok dan keyakinan kemampuan kelompok.

Penutup

Model partisipasi yang sesuai dengan kondisi lapangan adalah model dimana peran kemarahan berbasis kelompok tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik. Sedangkan variabel keyakinan kemampuan kelompok secara konsisten memiliki peranan langsung terhadap partisipasi politik.

Masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada mahasiswa terkait dengan perubahan kehidupan politik, karena mahasiswa adalah sosok yang telah mampu mengelola kepedulian atau empati atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat menjadi sebuah tindakan nyata dalam bidang politik di negara kita. Mahasiswa diharapkan lebih mampu meningkatkan kepekaan terhadap keluhan-keluhan masyarakat dan memahaminya secara lebih baik, dan berhati-hati agar keluhan yang didengar dari masyarakat bukan dipahami sebagai kelemahan dan ketidakberdayaan masyarakat.

Daftar pustaka

- Abdulsyani. (1992). *Sosiologi skematika teori dan terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Arbuckle, J.L. & Wothke, W. (1999). *Amos 4.0 User's Guide*. SmallWater Corporation.
- Averill, J. R. (1982). *Anger and aggression: An essay on emotion*. New York, NY: Springer.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: Freeman.
- Bartol, M.K., Durham, C.C. & Poon, M.J. (2001) Influence of Performance Evaluating Rating Segmentation on Motivation and Fairness Perception. *Journal of Applied Psychology*. Vol 86 (6) 1106 – 1119.
- Calise, M. & Lowi, T.J. (2010) *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept* . Chicago: The University of Chicago, 2010) p. 169.
- Colquitt, J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice : A Construct Validation of Measure. *Journal of Applied Psychology*. Vol 86 (3) 386 – 400.

- Ghozali, I. (2004). *Model Persamaan Struktural : Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, C.B., Randel, A.E.& Early, P.C. (2000). Understanding Group Efficacy. *Group & Organization Management*. Vol.25 No.1 67-97.
- [Http://regional.kompas.com/read/2014/04/08/1521043/Angka.Golput.Mahasiswa.DIY.Diperkirakan.Tinggi](http://regional.kompas.com/read/2014/04/08/1521043/Angka.Golput.Mahasiswa.DIY.Diperkirakan.Tinggi) diakses 18 April 2014
- [Http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/09/221423/255057911562/csistingkat-partisipasi-pemilih-75-golput-turun](http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/04/09/221423/255057911562/csistingkat-partisipasi-pemilih-75-golput-turun) diakses 18 April 2014.
- Hoogelt, A. (1995). *Sosiologi sedang berkembang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Huntington, S.P. & Joan Nelson, J. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 9-10.
- Klandermans, B. (1997). *The social psychology of protest*. Oxford, UK: Basil Blackwell
- Lazarus, R. S. (1991). *Emotion and adaptation*. New York, NY: Oxford University Press.
- Magstadt, T.M. *Understanding Politics* (Belmont: Cengage Learning, 2012) pp. 273-82.
- Matulesy, A. 2008. Model kausal partisipasi politik aktivitas gerakan mahasiswa. Disertasi. Tidak Diterbitkan. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM.
- Moorman, R (1991). Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior : Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenships? *Journal of Applied Psychology*. Vol 76 (6) 845 – 855.
- Olson, M. (1968). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Taylor, M.S., Tracy, K.B., Renard, M.K., Harrison, J.K., & Carrol S.J. (1995). Due Process in Performance Appraisal : A Quasi – Experimen in Procedural Justice. *Journal : Administrative Science Quarterly*. Vol 40 (3) 455+
- Tyler, T.R. (1989). The Psychology of Procedural Justice : A Test of the Group – Value Model. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 57 (5) 830-838.
- Tyler, T.R. (1994). Psychological Model of the Justice Motive : Antecedents of Distributive and Procedural Justice. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 67 (5). 850 – 863.
- Van den Bos, K. (2003). On Subjective Quality of Social Justice : The Role of Affect Information in the Psychology of Justice Judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 616-626.
- Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quanti- tative research synthesis of three socio-psychological perspec- tives. *Psychological Bulletin*, 134, 504-535
- Van Zomeren, M., Leach, C.W., & Spears, R. (2012). Protesters as “Passionate economists”: A dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage. *Society for Personality and Social Psychology review*, Sage pub.